

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /POJK.05/2021

TENTANG

PENGAWASAN PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

| *Draft* Peraturan | | Tanggapan | Usulan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Batang Tubuh | Penjelasan |
| Menimbang:  bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap pengawasan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai amanat pengaturan dan pengawasan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengawasan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero); | Pemerintah melalui narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki fokus untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan.  Salah satu metode yang digunakan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan adalah dengan pembentukan *holding* badan usaha milik negara (BUMN). Sebagai motor penggerak perekonomian nasional, pembentukan *holding* BUMN diharapkan dapat menjadi entitas yang besar, kuat, dan lincah.  Salah satu sektor yang berperan terhadap perekonomian adalah sektor asuransi dan penjaminan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia telah menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai *holding* dari BUMN asuransi dan penjaminan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tersebut juga diatur bahwa PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia berada dalam pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.  Selain bertindak sebagai pemegang saham dan *holding* dari BUMN asuransi dan penjaminan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional juga menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai *holding* di bidang keuangan dan investasi. Penunjukan tersebut menyebabkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia menjadi *holding* bagi sekuritas, perusahaan modal ventura, dan manajer investasi milik pemerintah.  Berdasarkan amanat pengaturan dan pengawasan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 dan dengan mempertimbangkan status PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai *holding* dari beberapa lembaga jasa keuangan yang berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan kemungkinan adanya peningkatan eksposur Risiko bagi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku *holding* maupun anak perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk menyusun ketentuan bagi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengawasan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut menjadi dasar hukum pengawasan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai entitas yang diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |  |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77); |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan:  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |
| 1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. |  |  |  |
| 1. Konglomerasi Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan. |  |  |  |
| 1. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan lembaga jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |  |  |
| 1. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. |  |  |  |
| 1. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. |  |  |  |
| 1. Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam lembaga jasa keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. |  |  |  |
| 1. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip - prinsip (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. |  |  |  |
| 1. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian Perusahaan dan pihak terkait dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| STATUS PERUSAHAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Perusahaan dan anak Perusahaan ditetapkan sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan. | Yang dimaksud “anak Perusahaan” adalah:   1. lembaga jasa keuangan yang merupakan anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional; dan 2. lembaga jasa keuangan yang mengalami pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia ke Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Sehubungan dengan status Perusahaan dan anak Perusahaan sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan ditetapkan sebagai entitas utama. | Entitas utama adalah lembaga jasa keuangan induk dari konglomerasi keuangan atau lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Perusahaan dan anak Perusahaan yang ditetapkan sebagai Konglomerasi Keuangan wajib memenuhi ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan. | Ketentuan mengenai konglomerasi keuangan mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai antara lain:   1. konglomerasi keuangan; 2. penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; 3. penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; dan 4. kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan,   dan peraturan pelaksanaannya. |  |  |
|  |  |  |  |
| PENGAWASAN |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Ruang Lingkup Pengawasan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap Perusahaan atas aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Ruang lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Cukup jelas |  |  |
| 1. aktivitas Perusahaan yang mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai perusahaan induk berdasarkan peraturan perundang-undangan; | Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” antara lain:   1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. pengelolaan aset Perusahaan; dan | Cukup jelas |  |  |
| 1. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Tata Cara Pengawasan |  |  |  |
| Paragraf Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pengawasan atas aspek kepatuhan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan langsung dan/atau Pengawasan tidak langsung. |  |  |  |
| Paragraf Kedua |  |  |  |
| Pengawasan Langsung |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan langsung terhadap Perusahaan melalui Pemeriksaan. | Pemeriksaan dalam rangka pengawasan langsung dilakukan di kantor Perusahaan dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perusahaan, termasuk dapat dilakukan dengan media *video conference*. |  |  |
| 1. Dalam rangka Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap pihak terkait. | Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain:   1. pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan untuk mewakili Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan; 2. anak Perusahaan selaku anggota Konglomerasi Keuangan. |  |  |
| 1. Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memperoleh gambaran mengenai kondisi Perusahaan; dan/atau |  |  |  |
| 1. menilai bahwa Perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Pengawasan langsung yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan dapat mencakup seluruh aspek atau sebagian aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain sebagai pemeriksa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan langsung, yang penunjukannya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja. | Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain akuntan publik, aktuaris, penilai independen, konsultan teknologi informasi, dan/atau pihak lainnya yang dapat ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan langsung terhadap Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pengawasan langsung terhadap Perusahaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan Pengawasan. | Yang dimaksud dengan pelaksanaan Pengawasan langsung sesuai kebutuhan Pengawasan adalah Pengawasan langsung yang frekuensi pelaksanaannya dapat lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dimana dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ayat (2) wajib: |  |  |  |
| 1. memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya; |  |  |  |
| 1. memberikan keterangan dan penjelasan berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan maupun tertulis. |  |  |  |
| 1. memberi kesempatan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa; dan/atau |  |  |  |
| 1. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Pengawasan langsung. |  |  |  |
| 1. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ayat (2) dilarang menolak dan/atau menghambat proses Pengawasan langsung. |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengawasan langsung dilakukan oleh tim pengawas berdasarkan surat perintah Pengawasan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sebelum dilakukan Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pengawasan langsung kepada Perusahaan dan pihak terkait yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |
| 1. Surat pemberitahuan Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. nomor dan tanggal surat perintah Pengawasan langsung; |  |  |  |
| 1. nama tim pengawas; |  |  |  |
| 1. ruang lingkup Pengawasan langsung; |  |  |  |
| 1. tujuan Pengawasan; |  |  |  |
| 1. jangka waktu Pengawasan langsung; dan |  |  |  |
| 1. dokumen-dokumen awal yang diperlukan untuk Pengawasan langsung. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pengawasan langsung tanpa didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan Pengawasan langsung apabila: |  |  |  |
| 1. terdapat dugaan adanya tindakan untuk mempersulit atau menghambat proses Pengawasan langsung; |  |  |  |
| 1. terdapat dugaan adanya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya; atau |  |  |  |
| 1. terdapat dugaan adanya tindakan menyembunyikan, menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pengawasan langsung. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dalam proses Pengawasan langsung, tim pengawas melakukan konfirmasi kepada Perusahaan dan/atau pihak terkait atas temuan pada Pengawasan langsung. | Tim pengawas melakukan konfirmasi kepada Perusahaan dan/atau pihak terkait untuk meminta penjelasan tambahan atas temuan tim pengawas atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud. |  |  |
| 1. Sebelum Pengawasan langsung berakhir, tim pengawas melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Perusahaan dan/atau pihak terkait atas temuan pada Pengawasan langsung. | Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* untuk memastikan hasil Pengawasan langsung oleh tim pengawas telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh Perusahaan maupun pihak terkait. |  |  |
| 1. Pada saat Pengawasan langsung berakhir, tim pengawas melakukan pertemuan dengan Direksi Perusahaan dan/atau pimpinan dari pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atas hasil Pengawasan langsung dan tindak lanjut dari hasil Pengawasan langsung. | Tim Pengawas melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pengawasan langsung beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pengawasan langsung kepada Direksi Perusahaan.  Dalam pertemuan atau *exit meeting* tidak ada lagi perbedaan pendapat antara tim pengawas dengan Perusahaan. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pengawas dengan Perusahaan, maka pendapat yang digunakan berasal dari tim pengawas. |  |  |
| 1. Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pengawasan langsung dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh tim pengawas dan direksi Perusahaan. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Periode Pengawasan langsung dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pengawasan langsung Perusahaan. | Cukup jelas |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Setelah proses Pengawasan langsung berakhir, tim pengawas menyusun laporan hasil Pengawasan langsung. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direksi Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Laporan hasil Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. |  |  |  |
| 1. Penggunaan laporan hasil Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak di luar Perusahaan harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dipersyaratkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Laporan hasil Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat memuat langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut tersebut. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil Pengawasan langsung. |  |  |  |
| 1. Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Perusahaan telah melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan laporan hasil Pengawasan. |  |  |  |
| Paragraf Ketiga |  |  |  |
| Pengawasan Tidak Langsung |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan Pengawasan tidak langsung melalui analisis atas: |  |  |  |
| 1. laporan berkala dan/atau laporan insidentil yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau |  |  |  |
| 1. informasi lainnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi | Cukup jelas |  |  |
| 1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |
| 1. keterbukaan; | Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. |  |  |
| 1. akuntabilitas; | Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. |  |  |
| 1. pertanggungjawaban; | Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. |  |  |
| 1. kemandirian; dan | Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. |  |  |
| 1. kesetaran dan kewajaran. | Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan kewajaran” adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diwujudkan paling sedikit dalam: |  |  |  |
| 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan; |  |  |  |
| 1. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; |  |  |  |
| 1. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; |  |  |  |
| 1. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal; |  |  |  |
| 1. penerapan kebijakan remunerasi; dan |  |  |  |
| 1. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan. |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap sistem dan prosedur pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (*self* *assesment*) atau dilakukan oleh pihak independen. | Yang dimaksud dengan “pihak independen” antara lain konsultan manajemen. |  |  |
|  |  |  |  |
| MANAJEMEN RISIKO |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. |  |  |  |
| 1. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: |  |  |  |
| 1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; |  |  |  |
| 1. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko |  |  |  |
| 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan |  |  |  |
| 1. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman penerapan manajemen risiko Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko. |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mencakup jenis risiko paling sedikit: |  |  |  |
| 1. risiko strategis; |  |  |  |
| 1. risiko operasional; |  |  |  |
| 1. risiko kredit; |  |  |  |
| 1. risiko pasar; |  |  |  |
| 1. risiko likuiditas; |  |  |  |
| 1. risiko hukum; |  |  |  |
| 1. risiko kepatuhan; dan |  |  |  |
| 1. risiko reputasi. |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perusahaan wajib melakukan penilaian tingkat risiko. |  |  |  |
| 1. Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun. |  |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi terhadap anak Perusahaan yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup paling sedikit: |  |  |  |
| 1. pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris; |  |  |  |
| 1. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi; |  |  |  |
| 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan |  |  |  |
| 1. sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup paling sedikit: |  |  |  |
| 1. tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan; |  |  |  |
| 1. tugas dan tanggung jawab komite Tata Kelola Terintegrasi; |  |  |  |
| 1. tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi; |  |  |  |
| 1. tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit internal terintegrasi; |  |  |  |
| 1. penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan |  |  |  |
| 1. penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi. |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENILAIAN  KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Setiap Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. |  |  |  |
| 1. Calon Direksi dan Dewan Komisaris yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PELAPORAN |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun: |  |  |  |
| 1. laporan bulanan; |  |  |  |
| 1. laporan triwulanan internal audit; dan |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan |  |  |  |
| 1. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; |  |  |  |
| 1. laporan triwulanan internal audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan; dan |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kondisi tertentu. | Contoh kondisi tertentu antara lain *force majeur*. |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun dan menyajikan laporan triwulanan internal audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b berdasarkan pedoman internal yang ditetapkan oleh Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dalam mata uang rupiah. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menggunakan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk menyampaikan laporan selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), informasi, dan/atau dokumen tertentu dalam rangka Pengawasan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| SANKSI DAN REKOMENDASI |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan/atau atas temuan hasil Pengawasan langsung, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan kepada Perusahaan dan/atau memberikan rekomendasi kepada pemegang saham. |  |  |  |
| 1. Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan dan/atau temuan Pengawasan langsung tidak dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan rekomendasi kepada pemegang saham dalam hal Perusahaan tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti surat peringatan atau atas temuan Pengawasan langsung. |  |  |  |
| 1. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: |  |  |  |
| 1. peninjauan kebijakan Perusahaan; dan/atau |  |  |  |
| 1. penggantian sebagian atau seluruh manajemen Perusahaan. |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang telah menjabat sebagai Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tetap dapat menjadi Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum yang bersangkutan diperpanjang jabatan atau peralihan jabatan pada Perusahaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  | Cukup jelas |  |  |
| 1. Kewajiban penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perusahaan sejak periode laporan bulan … 2022. |  |  |  |
| 1. Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
| 1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai sanksi administratif yang diatur dalam: 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan,   tidak berlaku bagi Perusahaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| WIMBOH SANTOSO |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
| YASONNA H. LAOLY |  |  |  |